

PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS (PENGENDALI PERKARA) PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

Deddy Sutendy

Abstrak

Peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau dominus litis, karena jaksa-lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Tujuan penelitian tesis ini adalah Mengetahui penerapan asas dominus litis (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan. Mengambarkan kedudukan jaksa pada kejaksaan dan jaksa pada KPK yang memegang asas dominus litis (penguasa perkara) dan prinsip een eln endelbaar (jaksa satu dan tidak terpisahkan) dalam sistem peradilan pidana. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap dualism kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh jaksa pada KPK agar proses penegakan hukum dapat dilaksanakan secara harmonis dan terpadu. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang diketahui bahwa Asas dominus litis (penguasa/pengendali perkara) dapat diterapkan terhadap kejaksaan yang berwenang melaksanakan penuntutan Mengacu pada single prosecution system dan berlandaskan pada prinsip en een ondeelbaar jaksa itu satu dan tidak terpisahkan. Sehingga, di negara manapun di dunia yang memiliki lembaga seperti KPK, penuntutan tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kedudukan jaksa pada kejaksaan dan jaksa pada KPK masing-masing memiliki kewenangan dalam memegang asas dominus litis (penguasa perkara). Namun kewenangan yang dimiliki lebih khusus hanya pada kasus tindak pidana korupsi. Kewenangan penuntutan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK merupakan kewenangan yang sah.UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa dan UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK yang merupakan aturan khusus. Kewenangan penuntutan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Upaya yang bias dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan terhadap

Kata kunci : Pengendali, Penuntutan dan Kejaksaan

**APPLICATION OF PRINCIPLE OF LITIS DOMINUS (CASE
CONTROLLER) PROSECUTION ACCORDING TO THE LAW
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 16 OF 2004
ABOUT AGO**

Deddy Sutendy

Abstract

The role and function very large in the process of criminal justice, the prosecutor becomes the controlling process of handling cases or dominus litis, because the prosecutor was the one that can determine whether a case can be submitted to the court or not based on valid evidence under the law of criminal procedure. The research objective of this thesis is the application of the principle Knowing dominus litis (ruler/controller case) can be applied to the prosecutor's authority to implement prosecution. A portrait position prosecutor at the prosecutor and the prosecutor on the Commission which holds the principle of dominus litis (court ruling) and ELN een principle endelbaar (attorney one and inseparable) in the criminal justice system. Knowing the efforts made by the Public Prosecutor at the Attorney for prosecution dualism of authority possessed by prosecutors on the Commission to make the process of law enforcement can be implemented in a harmonious and unified. Based on legal research methods normative approach to law known that the principle of dominus litis (ruler / controller case) can be applied to the prosecutor who authorized the prosecution Referring to implement single prosecution system and based on the principle that the prosecution ondeelbaar en een one and inseparable. Thus, in any country in the world which has an institution like the Commission, the prosecution is still being done by the Attorney General. The position of the prosecutor in the prosecutor's office and the prosecutor on the Commission each have jurisdiction in holding the principle of dominus litis (court ruling). However, the authority is more specifically only in cases of corruption. Prosecutorial powers granted by law to the Commission is the authority of the Attorney RI sah.UU the general legislation governing the existence and authority of the Prosecutor and the Attorney Act can be overridden by the Law Commission which is a specific rule. Prosecutorial powers on the Commission is constitutional, it is confirmed by a ruling of the Constitutional Court. Efforts can be done by the Public Prosecutor at the Attorney for prosecution dualism of authority possessed by prosecutors on the Commission to make the process of law enforcement can be implemented in a harmonious and integrated are eliminating the ego resulting institution counterproductive to the functioning of the institution.

Keywords: Control, Prosecution and the Attorney